



# STRATEGI HILIRISASI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN PROTEKSIONISME PADA KOMODITAS BAJA/BESI

Khairani Alawiyah Matondang<sup>1</sup>, Annisa Handayani<sup>2</sup>,  
Alawi Parlindungan Hasibuan<sup>3</sup>, Jelita Simanungkalit<sup>4</sup>, Rina<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Negeri Medan

[alawiyah@unimed.ac.id](mailto:alawiyah@unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [annisahandayanis60@gmail.com](mailto:annisahandayanis60@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[babydrackme@gmail.com](mailto:babydrackme@gmail.com)<sup>3</sup>, [jelitafebiola14@gmail.com](mailto:jelitafebiola14@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[rina20200407@gmail.com](mailto:rina20200407@gmail.com)<sup>5</sup>

## Abstrak

Proteksionisme dalam perdagangan internasional sering menjadi tantangan bagi negara – negara yang mengandalkan ekspor komoditas misalnya pada Indonesia. Salah satu sektor yang terkena kebijakan proteksionisme dari negara tujuan ekspor ialah industri baja dan besi, yaitu pada kebijakan larangan ekspor, sehingga pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu kebijakan hilirisasi. Hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi di dalam negeri. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor baja dan meningkatkan ekspor produk baja olahan dan menciptakan lapangan kerja. Artikel ini menganalisis strategi hilirisasi pada komoditas baja dan besi dalam menghadapi kebijakan proteksionisme serta melihat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

**Kata Kunci:** Hilirisasi, proteksionisme, baja, besi, Indonesia

## Abstract

Protectionism in international trade is often a challenge for countries that rely on commodity exports, such as Indonesia. One of the sectors affected by protectionism policies from export destination countries is the steel and iron industri, namely the export ban policy, so the government made a

policy, namely the downstream policy. This downstreaming aims to increase added value through processing raw materials into semi-finished or finished products in the country. This strategy is expected to reduce steel import dependence and increase exports of processed steel products and create jobs. This article analyzes the downstream strategy in steel and iron commodities in the face of protectionism policies and looks at its contribution to the national economy.

**Keywords:** Downstream, protectionism, steel, iron, Indonesia

## PENDAHULUAN

Proteksionisme merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh sebuah negara untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri. Dalam konteks perdagangan internasional, proteksionisme dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk tarif impor, kuota serta kebijakan non-tarif lainnya. Salah satu komoditas yang sering menjadi objek kebijakan proteksionisme di Indonesia adalah besi dan baja. Dilansir dari bisnis.com, kepala Badan Pusat Statistika BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa nilai ekspor besi dan baja tercatat sebesar US\$2,21 miliar atau naik 1,60 persen (*month-to-month/mtm*) dan 11,71 persen (*year-on-year*) (Anggela, 2023). Besi/baja merupakan suqatu komoditas yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur dan industri. Biji besi yang dihasilkan Indonesia selalu meningkat dalam beberapa tahun ini.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan “Kebijakan pemerintah dalam pengendalian impor sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi baja global yang mengalami kelebihan kapasitas, proteksionisme dan praktik perdagangan tidak adil” (Elvira, 2024). Teori ekonomi klasik yang dipopulerkan oleh David Ricardo dalam teori keunggulan komperatif berpendapat bahwa perdagangan bebas memberikan efisiensi yang lebih besar dalam jangka panjang (Matondang et al., 2024). Sehingga negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia memerlukan kebijakan protektif untuk membangun kapasitas industrinya sebelum dapat bersaing secara bebas dipasar global. Karena dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing industri local.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memberlakukan pembatasan ekspor bijih besi mentah. Adanya pembatasan ekspor biji besi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna mendukung daya saing industri nasional, khususnya dalam industri besi baja, yang sampai saat ini masih mengandalkan impor bahan baku (Pamudji, 2015). Pelarangan ekspor bahan mentah mineral ini tidak dibarenginya dengan perkembangan sektor hilir pertambangan. Padahal sesuai UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang



Peningkatan Nilai Tambah melalui Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, perusahaan tambang harus sudah memiliki pemurnian bijih mineral (smelter) sendiri, dan tidak diperbolehkan mengekspor mineral mentah. Kondisi ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu dengan melakukan hilirisasi. Sehingga artikel ini dibuat untuk melihat bagaimana kebijakan hilirisasi terhadap komoditas besi dan baja di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Hilirisasi**

Menurut Patunru, hilirisasi adalah upaya meredam ekspor bahan mentah dan sebaliknya mendorong industri domestik untuk menggunakan bahan tersebut karena meningkatkan nilai tambah domestik (sembari menciptakan lapangan kerja). Jika memang harus mengekspor, maka yang diekspor adaag barang jadi, hasil dari olahan bahan baku itu.

Hilirisasi adalah bagian proses industrialisasi, yang dimaksud dengan industrialisasi adalah proses transformasi dari suatu negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alamnya menjadi negara mandiri dari sesi ekonomi untuk kemakmuran rakyat (Hasan, 2024).

Hilirisasi memiliki banyak jenis, hilirisasi pada produk pertanian, pertambangan, perikanan, hutan, teknologi dan kesehatan. Namun pada artikel ini hanya membahas hilirisasi dari sektor pertambangan yaitu pengolahan bahan tambang bijih besi menjadi baja.

### **Proteksionisme**

Proteksionisme adalah kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dari pesaing asing dengan berupa tarif, subsidi, kuota impor atau pembatasan lainnya atau hambatan yang ditempatkan pada impor pesaing asing. Banyak negara telah menerapkan kebijakan proteksionis, walaupun faktanya hampir semua setuju bahwa negara diuntungkan oleh perdagangan bebas (Duignan, 2024).

Tarif impor adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang – barang yang di impor, serta pembatasan ekspor bahan mentah seperti pada biji besi merupakan langkah agar industri Indonesia lebih maju, dengan diperlakukannya tarif impor dan pembatasan ekspor sehingga mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

### **Komoditas Besi/Baja di Indonesia**

Besi merupakan logam kedua yang paling banyak dibumi ini (Prabowo, 2011). Besi/baja adalah komoditas yang memiliki peran penting dalam perekonomian global, terutama pada sektor manufaktur, kontruksi dan infrastruktur. Bahan utama dalam pembangunan adalah besi dan baja. sehingga besi dan baja memiliki peran yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut World Steel Association, produksi baja dunia mencapai lebih dari 1,8 miliar ton per tahun, dengan Cina sebagai



produsen terbesar. Indonesia terlibat sebagai produsen maupun konsumen aktif dalam industri baja dan besi.

Bijih besi sangat melimpah di Indonesia, persebarannya terutama pada wilayah Sumatra dan Kalimantan. Menurut Kementerian ESDM, Pada tahun 2020, Indonesia memiliki total sumber daya dan cadangan logam besi sebesar 3,859 miliar ton dan 927 juta ton. Namun, sebagian besar produksi biji besi di Indonesia masih belum diolah menjadi baja karena masih terbatasnya kapasitas industri pengolahan domestik. Sehingga Indonesia masih mengimpor baja setengah jadi maupun baja jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan teori proteksionisme dengan menggunakan variable kebijakan nasional dan kepentingan nasional. Metode ini digunakan untuk menjelaskan variabel yang ditimbulkan dari adanya kebijakan proteksionisme Indonesia pada komoditas baja/besi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data yang berasal dari berbagai literature baik dari buku, jurnal, artikel, website resmi serta kebijakan dalam negeri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu industri pendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia adalah industri baja/besi. Sehingga industri baja/besi dikatakan sebagai “mother of industri”. Baja/besi merupakan material logam yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia di dunia ini, sehingga semakin maju tingkat pembangunan berarti semakin banyak dibutuhkan sumber daya besi dan baja dalam proses pembangunan tersebut. Jadi semakin maju pembangunan suatu negara maka semakin banyak juga dibutuhkan besi dan baja untuk sumber daya pembangunan (Prasetyo, 2010). Saat ini Indonesia telah menerapkan pelarangan ekspor bahan mentah, berupa biji besi. Karena Indonesia mempunyai cadangan bijih besi yang cukup besar di daerah Sumatra dan Kalimantan. Namun, sebagian besar bijih besi yang ditambang di Indonesia diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Negara yang mengimpor bijih besi dari Indonesia kemudian mengolah bahan mentah tersebut menjadi baja setengah jadi atau baja jadi, kemudian Indonesia mengimpor baja setengah jadi atau baja jadi.

Adanya pelarangan atau pembatasan ekspor bijih besi dan baja adalah untuk mendukung hilirisasi industri. Menurut Patunru dalam (Deddy et al., 2023), hilirisasi sering disebut down streaming atau value – adding, yang berarti bahwa upaya meredam ekspor bahan mentah dan sebaliknya mendorong industri domestik untuk menggunakan bahan tersebut untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Ketua MPR Bambang Soesatyo



dalam laporan CNBC Indonesia menilai bahwa “kebijakan hilirisasi mineral yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional. Hilirisasi industri adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945” (Rachman, 2023). Proses hilirisasi penting karena dengan adanya hilirisasi pada sumber daya alam maka akan terbangun struktur industri yang lebih kuat karena terjadinya pembentukan industri hilir yang bernilai tambah lebih tinggi. Dengan pengembangan industri bernilai tambah lebih tinggi maka akan membentuk rantai nilai bahan baku local (local value chain) dengan industri pendukung dari wilayah lain sehingga pertumbuhan menjadi semakin inklusif.

Menurut Statistik Perdagangan Luar Negeri 2021, yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2007 ekspor Indonesia masih dibawah USD100 miliar. Namun pada 2011 naik menjadi USD180 miliar, karena kenaikan harga – harga komoditas. Seiring dengan merosotnya harga komoditas, ekspor ditahun berikutnya menyusut. Penyusutan itu mencapai 6,8% di tahun 2019. Tetapi adanya kebijakan hilirisasi, sebagai hasil program hilirisasi produksi manufaktur yang diantaranya nikel dan besi baja, memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Terlihat pada Data Pusat Statistic, pada 2021 ekspor Indonesia kembali rebound dan mencapai USD231 miliar. Pada tahun 2022 ini menguat pada level USD268 miliar. Untuk nilai pada ekspor besi dan baja Indonesia ditahun 2021 mencapai USD 20,95 miliar dengan pertumbuhan sebesar 93,13% dibandingkan ekspor tahun lalu. Capaian ekspor tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir besi dan baja terbesar di dunia dan menduduki urutan ke – 8 dengan pangsa mencapai 3,76% terhadap total ekspor besi dan baja didunia tahun 2021.

Proses hilirisasi dalam negeri mendorong adanya pembangunan pabrik peleburan (smelter), yang memungkinkan untuk pengolahan biji besi menjadi produk baja dengan kualitas ekspor. Dengan adanya pengolahan dalam negeri, Indonesia tidak hanya meningkatkan nilai ekspor besi dan baja tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor baja dari negara lain, yang pada waktu itu Indonesia mengimpor baja dari berbagai negara seperti cina dan jepang.

Dengan adanya peningkatan ekspor produk besi dan baja yang telah diolah, maka penerimaan negara dari sektor tambang juga meningkat, tercatat bahwa PNB sektor pertambangan merupakan sumber pendapatan terbesar kedua setelah pajak dalam APBN. Pada tahun 2022, PNB sektor pertambangan mencapai Rp173,5 triliun, atau sekitar 170% dari target yang ditetapkan. Adanya manfaat – manfaat yang diberikan, hilirisasi menjadi factor kunci dalam memperkuat perekonomian Indonesia secara berkelanjutan.



## KESIMPULAN

Strategi hilirisasi yang diterapkan oleh Indonesia merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi kebijakan proteksionisme global, khususnya dalam industri baja dan besi. Melalui hilirisasi, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah pada komoditasnya, mengurangi ketergantungan pada impor baja serta meningkatkan ekspor baja olahan. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri domestik dipasar global. Kebijakan hilirisasi untuk memperkuat sektor industri sangat besar terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Anggela, N. L. (2023, August 15). Besi dan Baja Jadi Komoditas Unggulan Penopang Ekspor Juli 2023 . *Ekonomi Bisnis.Com*.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230815/12/1685045/besi-dan-baja-jadi-komoditas-unggulan-penopang-ekspor-juli-2023>
- Deddy, M. A., Adriyanto, A., & Andreas, R. D. (2023). Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3).  
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5137/http>
- Duignan, B. (2024). Protectionism Definition, Examples, & Facts. In *Encyclopaedia Britannica (Ed.), Finance & the Economy*. Britannica Money.
- Elvira, V. (2024, May 22). Ekspor Baja Meningkat 38,3%, Impor Baja Turun 10,2% Kuartal I-2024. *Kontan.Co.Id*.  
<https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-baja-meningkat-383-impor-baja-turun-102-kuartal-i-2024>
- Hasan, M. A. (2024). Implikasi Putusan WTO Tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel. Universitas Islam Indonesia.
- Matondang, K. A., Sitio, F., Lahagu, P. H., & Hasibuan, M. R. F. (2024). Perbandingan TeoretisKeunggulan Absolut dan Keunggulan Komparatif : Implikasi Bagi Kebijakan Perdagangan Internasional. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2397>
- Pamudji, T. (2015). Dampak pembatasan ekspor bijih besi terhadap penerimaan sektor ESDM dan perekonomian nasional. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Prabowo, H. (2011). BIJIH BESI (Makalah).
- Prasetyo, P. E. (2010). Struktur dan Kinerja Industri Besi dan Baja



Indonesia Tidak Sekuat dan Sekokoh Namanya. JEJAK, 3(1).  
Rachman, A. (2023, August 16). Larangan Ekspor Mineral-Hilirisasi, MPR:  
Pemerintah Konsisten. CNBC Indonesia.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230816103359-4-463422/larangan-ekspor-mineral-hilirisasi-mpr-pemerintah-konsisten>

